

**PERSYARATAN INPASSING KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH HUKUM  
(Permenpan 42 Tahun 2018)**

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Sebelum melakukan pendaftaran/ registrasi, <b>wajib</b> memutakhirkan data diri dan melengkapi berkas dokumen yang dimiliki dalam dossier pada laman <a href="http://simpeg.kemenkumham.go.id">simpeg.kemenkumham.go.id</a>	Khusus bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2.	Batas Usia	✓ Jenjang Pertama dan Muda paling tinggi 56, ✓ Jenjang Madya paling tinggi 58 ✓ Usul disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum mencapai batas usia pensiun
3.	Surat Pernyataan Perhitungan Kebutuhan/ usulan	Khusus bagi pegawai pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/dan Instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM
4.	Surat Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Sekretariat Eselon I atau Kanwil bagi pegawai Kemenkumham)
5.	Surat Persetujuan atasan langsung	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
6.	Surat Keputusan Penempatan/atau surat tugas/ surat keputusan pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyuluhan hukum/bidang hukum di Instansi Pusat atau Instansi Daerah paling kurang 2 (dua) tahun	Pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun
7.	Salinan Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki	Paling Rendah Sarjana (S1)
8.	Salinan Surat pencantuman gelar ijazah terakhir dari BKN (Jika ada)	Jika PNS sudah berpangkat Penata Muda (III/a) melalui ujian dinas tingkat I dan telah memiliki ijazah S1, atau sudah berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) dan telah memiliki ijazah S2 namun tidak melalui penyesuaian ijazah S2.
9.	Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS	✓
10.	Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PNS	✓
11.	Salinan Surat Keputusan pangkat terakhir	Paling rendah Penata Muda (III/a)
12.	Salinan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki	✓
13.	Surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/ Sekretaris Unit Eselon I Pusat/ Pejabat yang berwenang atau paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
14.	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Penyuluh Hukum	Bagi yang sudah pernah mengikuti diklat Penyuluh Hukum yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM
15.	Salinan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP dan PPKP)	Paling kurang bernilai baik
16.	Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pmti dan jabatan administras	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
17.	surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
18.	Surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
19.	surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
20.	Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia	Dokumen dapat diunduh dalam menu " <b>Format Surat</b> " pada laman <a href="http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id">inpassingjafung.kemenkumham.go.id</a>
21.	surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah	✓
22.	surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus	Bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus